

LATAR BELAKANG



Perubahan dan perkembangan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, teknologi serta globalisasi memberi dampak pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Fenomena ini membuka celah munculnya berbagai bentuk perubahan perilaku negatif di masyarakat seperti kejahatan, terorisme, peredaran narkoba dan pelanggaran HAM. Fenomena-fenomena yang muncul dibidang Hukum dan HAM tersebut menjadi perhatian utama pada organisasi Departemen Hukum dan HAM. Terutama dalam mewujudkan kesadaran hukum (*law of awareness*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Departemen Hukum dan HAM merupakan departemen yang mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan lingkup kerja yang sangat beragam yaitu dalam Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Hak Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Penegakan serta Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan fungsi Departemen Hukum dan HAM sebagai salah satu pilar pemerintah di bidang penegakan Hukum dan HAM, maka menjadi tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dimasa yang akan datang. Salah satu faktor pendukung dalam pembangunan di bidang Hukum dan HAM adalah peran sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Setiap orang diyakini memiliki peran dan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk mengikuti perubahan yang ada.



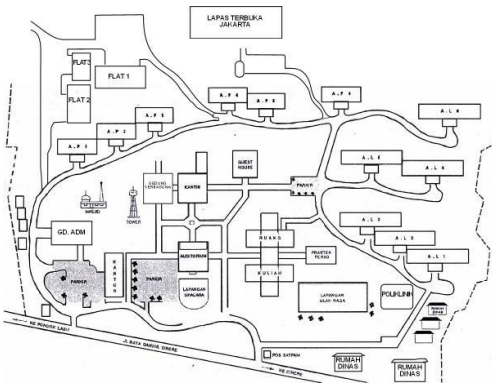
BPSDM Hukum dan HAM sebagai institusi di bidang pengembangan SDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis untuk memenuhi tuntutan peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur Hukum dan HAM. Melalui BPSDM Hukum dan HAM, tugas-tugas pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM dilaksanakan, dikordinasikan dan dibina serta

menjadi *strategic partner* dibidang Hukum dan HAM. Baik bagi sumber daya manusia di dalam Departemen Hukum dan HAM sendiri, maupun

SDM di bidang hukum dan HAM secara luas yang berada dalam lingkup nasional, seperti instansi pemerintah lainnya, lembaga legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

Pembangunan kesadaran dan penegakan Hukum dan HAM berdampak terhadap kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM. Strategi yang digunakan melalui pendekatan *competence based human resources management system (CBHRM)*. Mengingat, saat ini pekerjaan di organisasi sektor modern mulai berubah pada pekerjaan yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based works*) dan kebutuhan SDM ke arah SDM yang berpengetahuan (*knowledge workers*), karena itu pekerjaan pengembangan SDM lebih menekankan pada profesionalisme.

SEJARAH



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM merupakan organisasi baru sebagai hasil pengembangan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Pegawai Departemen Hukum dan HAM. Pusdiklat Pegawai dibentuk tahun 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor YS.4/3/7 Tahun 1975.

Penyelenggaraan diklat yang pertama dilaksanakan adalah Penataran BHP Tingkat I, dan Penataran Tenaga Teknis Imigrasi bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Hukum TNI Angkatan Darat. Pada Tahun 1978, telah tersedia prasarana berupa gedung berlantai 6 yang terletak di Jalan Batu Tulis Raya No. 11 Jakarta Pusat. Namun demikian pada perkembangannya fasilitas yang tersedia tersebut belum sepenuhnya dapat menampung seluruh kegiatan diklat, sehingga program diklat masih menggunakan tempat/instansi lain. Pada tanggal 29 Oktober 1987, pembangunan gedung Pusdiklat yang terletak di Jalan raya Gandul Cinere, yang populer dengan sebutan *Kampus Pengayoman* telah resmi menjadi tempat pusat mendidik dan melatih pegawai Departemen Kehakiman.



Berdasarkan atas pemikiran tersebut, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ditingkatkan eselonnya menjadi badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berdasar pada Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2006. Badan ini dibentuk dengan pertimbangan :

1. Adanya spesifikasi keilmuan/pengetahuan teknis operasional yang berbeda, yang tidak dapat diperoleh dari pendidikan universitas dan pendidikan formal lainnya
2. Badan ini memiliki peran dan program yang strategis guna meningkatkan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, serta melakukan percepatan profesionalisme pegawai yang dilakukan secara sistematis
3. Badan ini juga bertugas untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan yang dapat terus diinternalisasikan dan disosialisasikan

Pemimpin PUSDIKLAT Pegawai Departemen Hukum dan HAM dari tahun ketahun adalah : H. Ahmad Arif, SH., MPA (1975-1981), R. Budiman Bintoro Zacheroddin, SH (1981-1987), Charis Soebijanto, SH (1987-1989), Dr. R. Soegondo, MM. (1989-1991), H. Mohammad Zein, SH. (1991 - 1995), H. Adi Soejatno, Bc.IP., MH (1995-2000), H. Sidharto TD., SH., MH (2000-2004), H. Drs. Mukri Santoso, MM (2004-2005) dan H.M. Djuhdi Djuhardi, SH., MH. (2005-2007), yang kemudian Pusklat Menjadi Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM dengan pimpinan pertamanya adalah H. Drs. Mulki Manrapi, SH., MM (2007 s.d Sekarang).



VISI, MISI DAN SASARAN

Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Departemen Hukum dan HAM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM memiliki :

Visi :

Menjadikan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Berkualitas

Misi :

1. Menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Kepemimpinan dan Manajemen
2. Menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Teknis

3. Menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Fungsional dan Hak Asasi Manusia
4. Menyelenggarakan Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
5. Memberikan dukungan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

TUGAS POKOK

Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

SASARAN

1. Terbentuknya Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang professional, kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan ke masa depan
2. Terciptanya pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengetahuan
3. Terciptanya pendidikan teknis dan fungsional Hukum dan HAM yang memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional
4. Terciptanya pendidikan dan pelatihan dengan system belajar jarak jauh sehingga sumber daya manusia aparatur yang bertugas di unit pelaksana teknis dapat mengikuti diklat.
5. Terwujudnya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan organisasi yang bergerak dalam Bidang pendidikan dan pelatihan dari dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Hukum dan HAM

STRUKTUR ORGANISASI BPSDM HUKUM DAN HAM



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk berlandaskan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas peaturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia
2. Surat MENPAN RI No. B/941/M.PAN/2007 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 April 2007
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.04.PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :



1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen dan pelaksanaan program kerja pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Perumusan standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya manusia di biang hukum dan hak asasi manusia;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan badan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari :

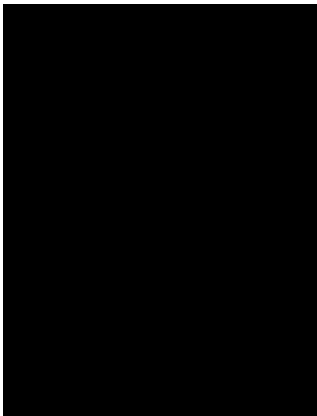
1. Sekretariat badan
2. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
3. Pusat Pengembangan Teknis
4. Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Akademi Ilmu Pemasarakatan
7. Akademi Imigrasi

Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi, penyusunan laporan dan kehumasan serta kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, administrasi pendidikan dan pelatihan serta administrasi jabatan fungsional
3. Pengelolaan urusan keuangan
4. Pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, pengamanan, pengangkutan dan perpustakaan serta kearsipan.

Sekretariat Badan terdiri dari :

1. Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama
2. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Umum

Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan dan manajemen
2. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam ranga pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan dan manajemen
3. Perumusan bahan pembinaan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan dan manajemen
4. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan dan manajemen
5. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan dan manajemen dengan instansi terkait dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
6. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan di lingkungan pusat.

Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen terdiri dari :

1. Bidang Program
2. Bidang Penyelenggaraan
3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pusat Pengembangan Teknis, menyelenggarakan fungsi :



1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis
2. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis
3. Perumusan bahan pembinaan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis
4. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis
5. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis dengan instansi terkait dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
6. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan di lingkungan pusat.

Pusat Pengembangan Teknis terdiri dari :

1. Bidang Program
2. Bidang Penyelenggaraan
3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia, menyelenggarakan fungsi :



1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang fungsional dan hak asasi manusia
2. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam ranga pengembangan sumber daya manusia di bidang fungsional dan hak asasi manusia
3. Perumusan bahan pembinaan pengembangan sumber daya manusia di bidang fungsional dan hak asasi manusia
4. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang fungsional dan hak asasi manusia
5. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang fungsional dan hak asasi manusia dengan instansi terkait dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
6. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan di lingkungan pusat.

Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

1. Bidang Program
2. Bidang Penyelenggaraan
3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

PROGRAM KEGIATAN

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, meliputi pengembangan internal yaitu bagi Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengembangan eksternal di bidang Hukum dan HAM pada Lembaga Pemerintah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Tugas pokok Pengembangan BPSDM Hukum dan HAM meliputi bidang Kepemimpinan, Manajemen, Teknis, Fungsional dan Hak Asasi Manusia, Kerjasama Hukum dan HAM, serta Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh.

Program Pengembangan Kepemimpinan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan memenuhi kualifikasi jabatan struktural, meliputi Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV dan Diklat Kader Pimpinan Departemen Hukum dan HAM Tingkat I dan II.

Program Pengembangan Manajemen

Kegiatan pelatihan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajerial pegawai, seperti : Pelatihan manajerial tingkat utama, madya dan tingkat mula. Kegiatan non pelatihan, antara lain : Pengembangan Program pelatihan, pengembangan kurikulum pelatihan, pengembangan standarisasi dan metode pelatihan.

Program Pengembangan Teknis

Kegiatan pelatihan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis substansi pegawai, meliputi :

1. Pelatihan teknis bidang Pemasarakatan
2. Pelatihan teknis bidang Keimigrasian
3. Pelatihan teknis bidang Administrasi Hukum Umum
4. Pelatihan teknis bidang Hak Kekayaan Intelektual
5. Pelatihan teknis bidang Peraturan Perundang-undangan

Program Pengembangan Fungsional

Kegiatan diklat yang mempunyai tujuan menduduki jabatan fungsional bekerjasama dengan instansi pembina jabatan fungsional, seperti, Widyaiswara, Perancang Perundang-undangan, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Paramedis, Auditor, Pemeriksa Hak Kekayaan Intelektual, Peneliti dan lain-lain

Program Pengembangan Hak Asasi Manusia

Kegiatan pelatihan yang mempunyai tujuan pada peningkatan pemahaman dan perwujudan hak asasi manusia di segala aspek kehidupan seperti : pelatihan HAM bagi seluruh komponen masyarakat, pelatihan TOT HAM bagi seluruh komponen masyarakat, Sosialisasi dan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Program Pengembangan Kerjasama Hukum dan HAM

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Hukum dan HAM dalam bentuk :

1. Melaksanakan kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asai manusia dengan instansi lain baik didalam maupun luar negeri.
2. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama pendidikan dan pelatihan hukum dan HAM dengan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri
3. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan rintisan gelar bekerjasama dengan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri baik di dalam maupun luar negeri

Program Pengembangan Diklat Jarak Jauh

1. Kegiatan Diklat yang mempunyai tujuan pada meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajerial pegawai, teknis substansi dan meningkatkan kesempatan memperoleh diklat bagi pegawai Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia
2. Mengembangkan modul diklat, sistem dan standarisasi diklat dan kompetensi tenaga pengajar

Disamping kegiatan pengembangan pegawai dengan bidang tertentu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM juga melaksanakan kegiatan lain yang mendukung kegiatan pengembangan SDM, antara lain :

1. Pengembangan Program Diklat
2. Pengembangan kurikulum diklat
3. Pengembangan standarisasi dan metode diklat
4. Pengembangan kualitas pengajar (widyaiswara)
5. Seminar, simposium, diskusi panel, studi banding dan lain-lain kegiatan akademis



AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN (AKIP), merupakan salah satu jalur dalam mempersiapkan kader pimpinan yang mumpuni di bidang Pemasyarakatan dimasa mendatang. Melalui berbagai kegiatan program pendidikan dan ekstrakurikuler yang diselenggarakannya diharapkan mampu membekali kader dengan berbagai kemampuan teknis kepribadian dan kepemimpinan

AKIP didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 270/1964 tanggal 24 Oktober 1964, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mendesak sumber daya manusia di bidang Pemasyarakatan, berkenaan adanya perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggaran hukum di Indonesia dari sistem pemasyarakatan. AKIP merupakan akademi kedinasan setingkat diploma 3 yang berkualifikasi Ahli Madya di bidang Ilmu Pemasyarakatan. Ilmu Pemasyarakatan adalah ilmu tentang tata perlakuan terhadap narapidana dalam sistem hukum Indonesia.

AKADEMI IMIGRASI (AIM), yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : JP.17/59/11 Tahun 1962 tanggal 21 Desember 1962. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis keimigrasian yang terampil dan profesional, namun sejak tahun 1976 Akademi Imigrasi praktis menghentikan kegiatannya.

Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan

FASILITAS

1. Gedung Kelas 3 Lantai

BPSDM Hukum dan HAM mempunyai Gedung kelas terdiri dari 36 ruangan besar dan kecil berkapasitas 2500 orang



Gedung Perkuliahan & Lahan Parkir

2. Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran yang dimiliki sebanyak 2 unit yang masing-masing terdiri atas tiga lantai



Gedung Perkantoran

3. Gedung Serbaguna

Gedung setinggi 3 lantai ini telah dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang mengoleksi ± 4000 judul buku, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang seminar dan kafetaria

4. Auditorium

Gedung ini terdiri 2 lantai yang mampu menampung 1700 orang dengan dilengkapi sarana audio visual lengkap dan modern



Auditorium

5. Asrama

Untuk menunjang kenyamanan peserta diklat, BPSDM Hukum dan HAM memiliki Asrama Pendidikan (AP) dan Asrama Latihan (AL) peserta sebanyak 6 unit, masing-masing terdiri dari 4 lantai dengan kapasitas tampung hingga mencapai 360 orang. Gedung asrama juga memiliki asrama tambahan untuk latihan sebanyak 6 unit (3 lantai) yang mampu menampung 540 orang, serta gedung asrama eksekutif berlantai 3 dan 4 sebanyak 3 unit dengan kapasitas 190 orang.



Asrama Pendidikan



Jalan Lingkungan sekitar Asrama

6. Fasilitas Penunjang

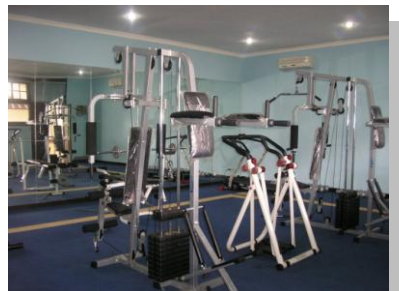
- a. **Ruang Karaoke dan Fitness**
- b. **Guest House** (untuk tamu VIP, terdiri dari 4 kamar tidur dan lobby yang representatif)
- c. **Kantin** (2 lantai bagi Taruna AKIP dan AIM serta peserta pelatihan)
- d. **Lapangan Tenis** (dilengkapi dengan ruang ganti dan kamar mandi, lapangan bola basket dan bola volley)
- e. **Masjid** (seluas 676 m2 dengan kapasitas 500 jamaah)
- f. **Lahan Parkir**
- g. **Koperasi Pegawai** (dilengkapi dengan Waserba, Foto Copy, Laundry, Penjualan pakaian dan atribut dinas dan lain lain)
- h. **Poliklinik**



Masjid Al-Maidah



Ruang Karaoke



Ruang Fitness



Kantin



Lapangan Tenis



Rumah Dinas



Flat 1 dan Flat 2